

UKBI SEBAGAI BENTENG PERTAHANAN DALAM MENGHADAPI BANGSA ASING

Anggun Citra Sari Dewi
FKIP Universitas Bengkulu
anggunsaridewi@gmail.com

ABSTRAK

Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa Negara yang keberadaannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Ini berarti bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa kesatuan yang menjadi identitas bangsa Indonesia dan harus dipertahankan konsistensinya. Penghapusan syarat penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bagi warga Negara asing yang bekerja di Indonesia merupakan salah satu gejala melemahnya pertahanan bangsa Indonesia dalam menjaga identitas nasional. Tes Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) dapat menjadi salah satu alat pertahanan kita untuk membentengi diri dari pengaruh budaya dan bahasa asing yang tentunya akan semakin bermunculan seiring dengan dibukanya peluang kerja bagi warga negara asing di Indonesia.

Kata Kunci: UKBI, identitas nasional, bangsa asing.

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang diikuti dengan berkembangnya pasar bebas di dunia internasional juga merambah negara Indonesia. Di zaman sekarang ini sudah semakin banyak perusahaan-perusahaan dan berbagai produk asing yang beredar luas di negara ini. Begitu pula dengan tenaga kerja yang saat ini semakin banyak berdatangan dari berbagai negara, mulai dari para petinggi hingga buruh dan pedagang eceran yang berasal dari bangsa asing. Sebagian dari mereka datang atas permintaan kita melalui berbagai prosedur dan sebagian lainnya datang melalui jalur yang tidak resmi.

Masuknya produk-produk dan tenaga kerja asing dari berbagai negara tentunya memberikan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Tidak dapat dielakkan terjadinya persaingan antara produk dan tenaga kerja lokal

dengan para pendatang yang sering dianggap lebih berkualitas. Hal ini diperparah dengan semakin longgarnya persyaratan dan aturan yang ditetapkan pemerintah terhadap bangsa asing. Keadaan seperti inilah yang membuat posisi pribumi semakin tersisihkan.

Semakin dipermudahnya persyaratan dan peraturan bagi para pendatang dapat dilihat dari dihapuskannya syarat tenaga kerja asing harus dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang sebelumnya tercantum dalam pasal 26 ayat (1) Permenakertrans 12/2013. Dihapuskannya syarat tersebut sama saja membiarkan berbagai bahasa asing berkembang di Indonesia. Apabila kondisi ini terus berlanjut maka bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional akan semakin tertinggal. Padahal bahasa Indonesia telah terbukti mampu mempersatukan sekitar 1.128 suku

bangsa (JPNN Mobile, 2010) dengan 746 bahasa daerah (Sugono, 2008) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Artinya, Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional serta bahasa resmi kenegaraan. Dalam artikel ini selanjutnya akan membahas lebih dalam tentang penggunaan UKBI sebagai benteng pertahanan identitas nasional dalam menghadapi bangsa asing.

Tes Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI)

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dirintis melalui berbagai peristiwa kebahasaan yang diprakarsai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional. Didalam web khusus UKBI milik badan bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dijelaskan bahwa gagasan awal dibuatnya tes UKBI ini terungkap dalam Kongres Bahasa Indonesia IV pada tahun 1983. Selanjutnya, dalam Kongres Bahasa Indonesia V pada tahun 1988 muncul pula gagasan tentang perlunya sarana tes bahasa Indonesia yang standar. Oleh karena itu, Pusat Bahasa mulai menyusun dan membakukan sebuah instrumen evaluasi bahasa Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, instrumen evaluasi itu diwujudkan, kemudian dinamai dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).

Tes UKBI merupakan sarana evaluasi kemahiran penutur bahasa Indonesia, termasuk penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Sesuai dengan sejarah

perintisannya, Tes UKBI dimaksudkan untuk beroperasi / berfungsi seperti halnya Tes TOEFL sebagai sarana evaluasi eksternal bagi dunia pengajaran bahasa. Kemahiran bahasa Indonesia yang diukur berupa kemahiran berbahasa Indonesia lisan dan tulis, baik yang bersifat reseptif maupun produktif. Sementara itu, penutur bahasa Indonesia yang dimaksud adalah penutur asli yang merupakan orang atau warga Negara Indonesia dan penutur asing yang merupakan warga Negara asing (Budihastuti, 2012). Selanjutnya, Budiharti, seperti yang dijelaskan juga pada web badan bahasa Kemendikbud, menjelaskan bahwa kriteria yang menjadi acuan UKBI adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan nyata penutur bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa ranah komunikasi yang merujuk pada ranah kecakapan hidup umum, yaitu ranah kesintasan dan ranah kemasyarakatan serta ranah kecakapan hidup khusus, yaitu ranah keprofesian dan ranah keilmiahan.

Materi-materi dalam soal UKBI didasarkan pada materi-materi penggunaan bahasa Indonesia baik lisan dan tulisan dalam ranah-ranah komunikasi tersebut. Dalam penggunaan bahasa Indonesia lisan, UKBI mengukur keterampilan reseptif peserta uji dalam kegiatan mendengarkan dan mengukur keterampilan produktif peserta uji dalam kegiatan berbicara. Dalam penggunaan bahasa Indonesia tulis, UKBI mengukur keterampilan reseptif peserta uji dalam kegiatan membaca dan mengukur keterampilan produktif peserta uji dalam kegiatan menulis. Selain menekankan pengukuran terhadap empat

keterampilan berbahasa tersebut, UKBI juga mengukur pengetahuan peserta uji dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia.

Hasil UKBI peserta uji dikelompokkan kedalam tujuh peringkat dan ditafsirkan ke dalam tujuh predikat. Peringkat tersebut ditentukan berdasarkan rentang skor yang telah dirumuskan. Pemeringkatan hasil UKBI ditampilkan kedalam tabel berikut.

Tabel 1. Pemeringkatan Hasil UKBI

Rentang Skor	Peringkat	Predikat
750—900	I	Istimewa
675—749	II	Sangat Unggul
525—674	III	Unggul
375—524	IV	Madya
225—374	V	Semenjana
150—224	VI	Marginal
0—149	VII	Terbatas

Aturan pemeringkatan ini telah dikukuhkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia kedalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 152/U/2003UKBI. Selain itu, UKBI juga telah diresmikan sebagai karya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 8 Januari 2004.

Bahasa Indonesia Sebagai Identitas Nasional

Seminar politik bahasa nasional yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada bulan Februari 1975 dan kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, menetapkan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional. Fungsi tersebut adalah (1) sebagai lambang kebanggaan nasional, (2) sebagai lambang identitas nasional, (3) sebagai bahasa persatuan nasional dari masyarakat yang berbeda-

beda bahasa daerah, dan (4) sebagai bahasa perhubungan antarbahasa dan antarbudaya.

Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional merupakan fungsi yang melekat pada masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, setiap anggota masyarakat kita harus bisa dan mampu berbahasa Indonesia baik secara lisan maupun tertulis. Dengan begitu identitas kita sebagai warga Negara Indonesia akan tampak melalui penggunaan bahasa ini.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dalam Bab XV, Pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Dalam kedudukan sebagai bahasa resmi negara ini, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, yaitu (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa resmi dalam pengajaran di sekolah, (3) bahasa resmi dalam pembangunan dan pemerintahan pada tingkat nasional, serta (4) bahasa resmi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk diketahui bahwa pada saat proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 kurang dari 10% dari sekitar 85 juta penduduk yang bisa membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, 600 ribu orang yang duduk di SD dan 500 anak di sekolah lanjutan. Tahun 1980 hasil sensus penduduk terdata bahwa 39% anak di atas usia 5 tahun tidak bisa membaca dan menulis. Hasil sensus penduduk tahun 1990 terdata bahwa 17% penduduk berusia 5 tahun ke atas buta aksara. Pada tahun 2010 masih terdata bahwa 9 juta orang penduduk Indonesia buta aksara (Maryanto, 2011). Fakta ini menunjukkan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia

masih sangat diperlukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kasus buta aksara yang terdapat di Indonesia.

Bahasa Indonesia Untuk Tenaga Kerja Asing

Dalam konteks masuknya arus tenaga kerja asing ke Indonesia, maka sudah selayaknya masyarakat Indonesia tidak cemas dan bingung dengan keharusan penguasaan Bahasa Inggris. Sebaliknya, siapapun yang datang kemarilah yang harus cemas dan bingung dengan ketidakmampuannya berbahasa Indonesia. Pola pikir yang ada selama ini perlu dibalik karena berdasarkan struktur dan morfologinya, Bahasa Indonesia sebenarnya sudah pantas untuk maju menjadi bahasa modern dalam pertukaran informasi, sehingga kita dapat menikmati berbagai macam kemajuan karya sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi tanpa perlu menunggu sampai kita mampu berbahasa Inggris atau asing lainnya (Saparie, 2008).

Langkah paling nyata dari pemerintah kita adalah dengan adanya penyelenggaraan dan penyemaran program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA). Program ini diperuntukkan bagi para penutur asli bahasa asing yang tertarik untuk mempelajari Bahasa Indonesia yang diselenggarakan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia berkat kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri. Program ini akan semakin memperkenalkan Bahasa Indonesia ke masyarakat dunia yang lebih luas, sehingga posisi Bahasa Indonesia di mata

dunia dapat setara dengan bahasa-bahasa besar lainnya.

Oleh karena itulah, sudah sepantasnya kita berteguh hati dengan Bahasa Indonesia yang kita miliki. Para tenaga asing itulah yang harus mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan bahasa kita bila ingin bekerja di negara kita. Sederas apapun arus globalisasi yang masuk ke Indonesia, Bahasa Indonesia harus tetap tegak. Untuk itu diperlukan beberapa upaya untuk memperkuat posisi Bahasa Indonesia di mata masyarakat Indonesia sendiri. Sylado (2008) berpendapat bahwa cara sederhana untuk mensosialisasikan bahasa adalah melalui musik, film, pers, dan sastra. Para pemangku kepentingan di empat bidang pekerjaan tersebut sudah seharusnya turut berpartisipasi dalam menegakkan tonggak Bahasa Indonesia sebagai lambang jatidiri bangsa dengan menghindari sebisanya mungkin penggunaan istilah atau ungkapan-ungkapan asing.

Sebagaimana saat ini banyak perusahaan-perusahaan dan berbagai lembaga yang mengharuskan adanya standar skor TOEFL, TOEIC, IELTS atau IBT sebagai syarat untuk diterima di perusahaan atau lembaga tersebut, seperti itulah juga seharusnya bangsa Indonesia mewajibkan adanya standar nilai UKBI bagi para tenaga kerja asing yang ingin bekerja di negara ini. Dengan diwajibkannya syarat nilai UKBI tersebut, secara langsung maupun tidak langsung akan menjaga pertahanan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa Indonesia. Para tenaga kerja asing tentunya mau tidak mau harus mulai mempelajari bahasa Indonesia dan tentu saja bukan mustahil bahwa bahasa Indonesia akan semakin

banyak digunakan oleh penutur asing dan akan semakin berkembang di negara-negara asal mereka.

KESIMPULAN

Bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia haruslah dipertahankan untuk tetap berada pada posisinya sebagai bahasa nasional dan bahasa Negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penghapusan syarat penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bagi para tenaga kerja asing dapat mengancam posisi bahasa Indonesia karena dengan masuknya tenaga kerja asing akan membawa pengaruh dalam segi bahasa, budaya dan lain-lain. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang seharusnya dapat mengambil sikap untuk membentengi diri dari berbagai pengaruh bangsa asing tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan tetap mewajibkan syarat penggunaan bahasa Indonesia bagi para tenaga kerja asing melalui proses Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) sehingga seluruh warga Negara asing yang bekerja di Indonesia dapat lebih menghormati bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Budiastuti, E. 2012. Upaya Peningkatan Profesionalisme Gurur Melalui Tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. ISQAE, hal 13-22. Diakses dari <http://www.isqae.com/isqae2013>

[/ISQAE2012_Book3.pdf](#) (Tanggal akses 7 oktober 2015)

JPNN Mobile. 2010. Indonesia Miliki 1.128 Suku Bangsa. Diakses dari <http://m.jpnn.com/news.php?id=57455>. (Tanggal akses 7 Oktober 2015).

Maryanto. 2011. Prospek Keberaksaraan Bahasa Persatuan. Koran Tempo, Jakarta, 21 Oktober 2011.

Saparie, G. 2008. Logika dan Kaidah Pembentukan Istilah Akuntansi. Dalam Sutami, Hermina dan Wrihatni, Novika Stri (Peny.), Kosakata Bahasa Indonesia Mutakhir, Publikasi No.6. Jakarta: Penerbit Pusat Leksikologi dan Leksikografi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Sugono, D. 2008. Politik Bahasa Nasional dalam Era Otonomi Daerah. Raja Ali Haji. Diakses dari <http://www.rajaalihaji.com/id/article.php?a=RGdIL3c%3D>. (Tanggal akses 7 Oktober 2015).

Sylado, R. 2008. Kata Kotor, Kata Suci, dan Kata Suka-Suka. Dalam Sutami, Hermina dan Wrihatni, Novika Stri (Peny.), Kosakata Bahasa Indonesia Mutakhir, Publikasi No.6. Jakarta: Penerbit Pusat Leksikologi dan Leksikografi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Notulen Seminar

Moderator : Drs. Agus Joko Purwadi, M.Pd

Notulis : Mei Hardiah, S.S.,M.A

Juni Andriati (Mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNIB)

Pertanyaan:

Apakah UKBI juga dapat digunakan sebagai syarat bagi orang asing yang akan bersekolah di Indonesia?

Jawaban:

Sangat bisa

Dio Aristan (Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNIB)

Pertanyaan:

Bagaimana tanggapan Saudara tentang kebijakan yang menghapus syarat mampu berbahasa Indonesia bagi pekerja asing?

Jawaban:

sangat disayangkan, seharusnya pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

Yessi Travolta (Mahasiswa S1 Pendidikan bahasa Inggris FKIP UNIB)

Pertanyaan:

Apakah UKBI membawa dampak bagi perkembangan pengajaran Bahasa Inggris di Indonesia?

Jawaban:

Sampai saat ini dapat dikatakan belum ada dampak yang berarti dari UKBI terhadap pengajaran Bahasa Inggris di Indonesia.